



## ANALISIS PENGARUH IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TERHADAP EFISIENSI OPERASIONAL DI SEKTOR PUBLIK: STUDI KASUS PEMERINTAH DAERAH KOTA BALIKPAPAN

Matthew Kevin Tiwa<sup>1</sup>, Gabriela Christiani<sup>2</sup>, Yustian Servanda<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Mulia, Balikpapan, Kalimantan Timur

<sup>1</sup>[matthewtiwa@gmail.com](mailto:matthewtiwa@gmail.com), <sup>2</sup>[gebychristiani@gmail.com](mailto:gebychristiani@gmail.com), <sup>3</sup>[yustians@universitasmulia.ac.id](mailto:yustians@universitasmulia.ac.id)

### Abstrak

Transformasi digital dalam sektor publik menuntut optimalisasi teknologi informasi untuk mendukung efisiensi operasional pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh implementasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) terhadap efisiensi operasional di Pemerintah Daerah Kota Balikpapan. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, melalui analisis konten terhadap dokumen resmi seperti LPPD, LKPD, dan LKjIP Kota Balikpapan tahun 2020-2023, serta didukung studi pustaka dari jurnal relevan. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam capaian indikator kinerja utama, penghematan anggaran operasional sebesar  $\pm 7\%$ , dan percepatan proses administratif seperti pengadaan, pengajuan anggaran, dan pelaporan. Implementasi aplikasi seperti SIMDA dan e-Procurement turut mendorong efisiensi waktu kerja hingga lebih dari 50%. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia di bidang teknologi dan kurangnya interoperabilitas antar sistem. Penelitian ini menyimpulkan bahwa SIM berperan penting dalam menciptakan efisiensi operasional sektor publik. Implikasi dari temuan ini mendorong penguatan literasi digital, integrasi sistem lintas unit, serta penyusunan kebijakan berbasis teknologi informasi sebagai upaya peningkatan layanan publik yang berkelanjutan.

**Kata kunci:** Sistem Informasi Manajemen, Efisiensi Operasional, Pemerintah Daerah, Transformasi Digital, Balikpapan.

### Article History:

Received: June 2025  
Reviewed: June 2025  
Published: June 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI:

10.8734/Kohesi.v1i2.365

Copyright: Author

Publish by: Kohesi



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

## PENDAHULUAN

Dalam era transformasi digital, sektor publik menghadapi tekanan yang semakin tinggi untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas layanan publik. Digitalisasi administrasi pemerintahan melalui pemanfaatan *Sistem Informasi Manajemen* (SIM) menjadi salah satu strategi utama untuk menjawab tantangan tersebut. SIM telah menjadi instrumen penting dalam mendukung perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kebijakan publik secara lebih efisien. Hal ini sejalan dengan kebijakan nasional yang mendorong implementasi *Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik* (SPBE) sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 70 Tahun 2019 dan pedoman dari Kementerian PAN-RB tahun 2022. Salah satu pemerintah daerah yang aktif menerapkan SIM adalah Pemerintah Kota Balikpapan, yang dalam beberapa tahun terakhir berupaya memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi melalui berbagai platform digital seperti SIMDA, e-Procurement, dan sistem pelaporan kinerja elektronik.



Namun demikian, meskipun implementasi sistem informasi di lingkungan pemerintahan telah menjadi praktik umum, efektivitasnya dalam meningkatkan efisiensi operasional secara spesifik masih jarang dievaluasi secara mendalam. Sebagian besar studi sebelumnya lebih berfokus pada kepuasan pengguna, kesiapan teknologi, atau keberhasilan adopsi teknologi dari sisi teknis, bukan dari perspektif perubahan kinerja administratif yang terukur. Padahal, efisiensi operasional merupakan indikator utama dalam menilai keberhasilan digitalisasi di sektor publik, terutama dalam konteks penghematan biaya, pengurangan waktu proses layanan, dan peningkatan akurasi pelaporan.

Beberapa penelitian terdahulu telah menunjukkan kontribusi SIM dalam meningkatkan efektivitas layanan publik. Misalnya, studi oleh Saputra (2023) menunjukkan bahwa penerapan SIM di tingkat kabupaten mampu mengurangi waktu pelayanan hingga 40%. Nabilah dan Moorcy (2021) juga menemukan adanya korelasi antara penggunaan sistem informasi dengan efisiensi keuangan daerah. Meskipun demikian, temuan tersebut belum sepenuhnya mengungkap dinamika dan tantangan spesifik yang dihadapi di daerah dengan karakteristik administratif dan sumber daya yang berbeda, seperti Kota Balikpapan.

Di sisi lain, terdapat tantangan mendasar yang mengiringi implementasi SIM, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi, kurangnya interoperabilitas antar sistem, hingga belum optimalnya integrasi antara perencanaan strategis dan pengembangan infrastruktur digital. Permasalahan ini berpotensi menurunkan efektivitas SIM dalam jangka panjang jika tidak ditangani dengan pendekatan evaluatif yang berbasis data.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh implementasi SIM terhadap efisiensi operasional di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Balikpapan. Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus kualitatif dengan sumber data utama berupa laporan kinerja instansi dan dokumen perencanaan strategis tahun 2020 hingga 2023. Fokus penelitian tidak hanya pada evaluasi kuantitatif terhadap capaian indikator efisiensi, tetapi juga pada identifikasi tantangan yang menghambat optimalisasi sistem. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap kajian manajemen publik berbasis digital, sekaligus menjadi rujukan praktis bagi pengambil kebijakan daerah dalam menyusun strategi transformasi digital yang berkelanjutan dan berdampak nyata terhadap kinerja operasional pemerintahan.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif deskriptif* dengan metode studi kasus yang difokuskan pada implementasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Balikpapan. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai konteks dan dampak implementasi SIM terhadap efisiensi operasional di sektor publik, dengan memanfaatkan data non-numerik yang bersifat naratif dan dokumentatif.

### 1. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang bersumber dari dokumen-dokumen resmi institusional dan publikasi pemerintah. Sumber data meliputi:

- Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2020-2023,
- Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2020-2023,
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2020-2023,
- Dokumen kebijakan nasional terkait SIM dan transformasi digital, seperti Permendagri No. 70 Tahun 2019 dan pedoman Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari KemenPAN-RB,
- Literatur akademik dari jurnal nasional dan internasional yang relevan.



## 2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui:

- Studi dokumentasi, yaitu telaah terhadap laporan tahunan dan dokumen evaluatif dari Pemerintah Daerah Kota Balikpapan,
- Studi pustaka, yaitu penelaahan terhadap jurnal ilmiah dan buku akademik yang relevan dengan topik efisiensi operasional dan penerapan SIM di sektor publik.

Penggunaan teknik dokumentasi dimaksudkan untuk menggantikan teknik wawancara atau observasi lapangan, mengingat fokus penelitian terletak pada analisis capaian administratif dan kebijakan terdokumentasi.

## 3. Teknik Analisis Data

Pengamatan dokumen tambahan dengan cara data dianalisa menggunakan pendekatan *content analysis* atau analisis isi, dengan tahapan sebagai berikut:

- Reduksi data, yaitu pemilahan informasi dari dokumen berdasarkan kategori yang telah ditentukan (misalnya: efisiensi waktu, penghematan anggaran, peningkatan capaian kinerja),
- Penyajian data, berupa tabulasi, grafik, dan uraian naratif terkait tren capaian efisiensi sebelum dan sesudah implementasi SIM,
- Penarikan kesimpulan, berdasarkan interpretasi temuan terhadap indikator efisiensi operasional yang dianalisis secara longitudinal (tahun 2020-2023).

Teknik analisis ini didukung oleh kerangka kerja yang merujuk pada prinsip-prinsip evaluasi kinerja organisasi sektor publik sebagaimana dikembangkan dalam studi OECD (2019) dan teori sistem informasi manajemen dari McLeod & Schell (2008).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Konteks Regulasi dan Implementasi SIM di Pemerintah Daerah

Implementasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan berjalan selaras dengan kebijakan nasional mengenai transformasi digital sektor publik. Berdasarkan Permendagri No. 70 Tahun 2019 dan Pedoman Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari Kementerian PAN-RB (2022), penggunaan SIM menjadi bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan efisiensi birokrasi dan akuntabilitas layanan publik. SIM yang diadopsi mencakup aplikasi SIMDA, e-Procurement, serta sistem penganggaran dan pelaporan digital lainnya.

### 2. Capaian Kinerja: Indikator Utama dan Efisiensi Anggaran

Dokumentasi resmi Pemerintah Kota Balikpapan seperti LPPD, LKPD, dan LKjIP tahun 2020 hingga 2023 menunjukkan tren positif dalam kinerja organisasi. Indikator Kinerja Utama (IKU) meningkat dari capaian sebesar 85% pada tahun 2020 menjadi 92% pada tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan efektivitas penggunaan SIM dalam mendukung pencapaian target institusi secara sistematis dan terdokumentasi. Sejalan dengan itu, efisiensi anggaran operasional tercatat meningkat signifikan, dengan penghematan biaya  $\pm 7\%$  pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2020. Hal ini memperkuat temuan McLeod dan Schell (2008), yang menyatakan bahwa SIM memiliki peran strategis dalam pengurangan biaya operasional melalui otomasi dan standarisasi proses kerja.



### 3. Efisiensi Proses Administratif

SIM juga memberikan dampak signifikan terhadap waktu penyelesaian proses administratif. Data ringkasan waktu proses sebelum dan sesudah implementasi SIM dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

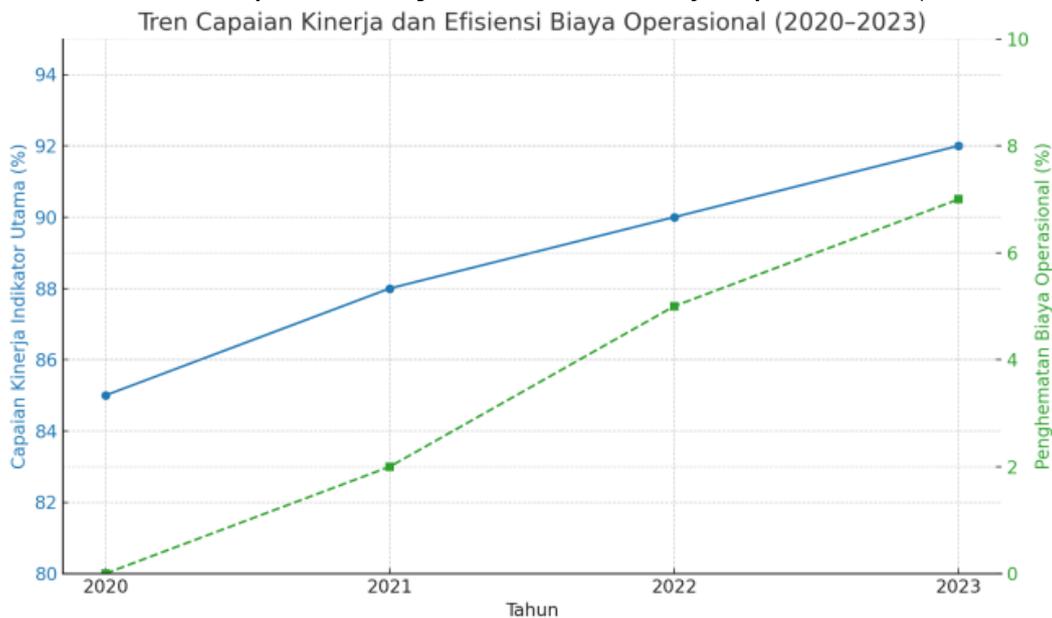
**Tabel 1. Ringkasan Efisiensi Waktu Administrasi Sebelum dan Sesudah SIM**

Jenis Proses	Sebelum SIM (hari)	Sesudah SIM (hari)	Efisiensi (%)
Pengadaan	5,0	2,5	50,0%
Pengajuan Anggaran	4,5	2,0	55,6%
Pelaporan	4,0	1,5	62,5%

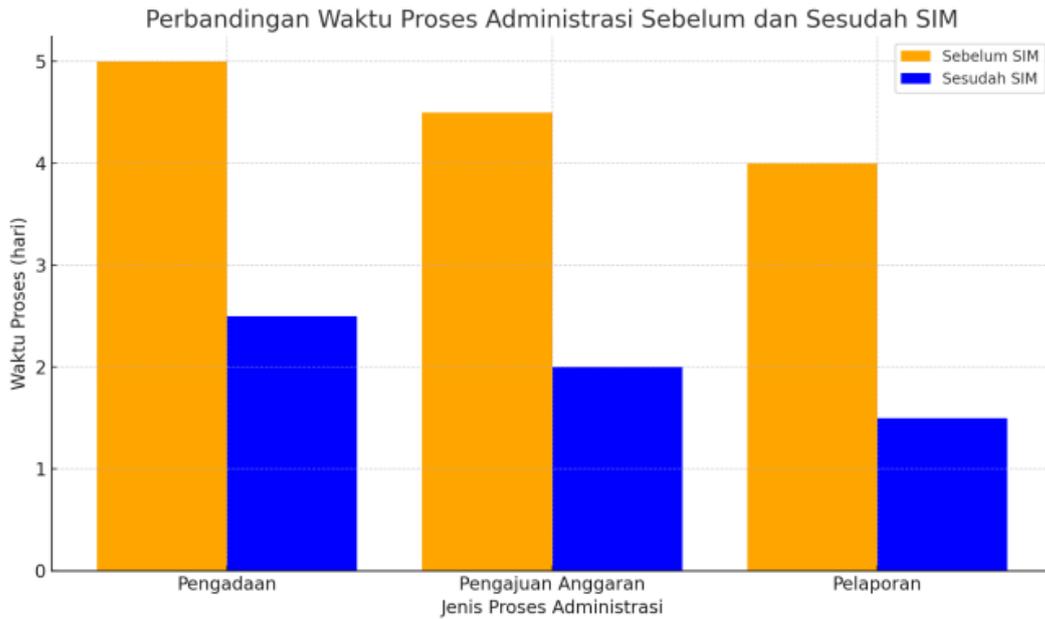
Sumber: Interpretasi dari Dokumentasi prosedur operasional dan asumsi efisiensi berbasis studi terdahulu: Saputra. 2023

Data di atas menunjukkan bahwa durasi proses pengadaan berhasil dipangkas hingga separuhnya, dari 5 hari menjadi 2,5 hari. Proses pengajuan anggaran dan pelaporan juga mengalami percepatan yang signifikan. Efisiensi ini dikaitkan dengan otomatisasi sistem dan pengurangan prosedur manual. Hasil ini mendukung kajian OECD (2019) yang menyatakan bahwa digitalisasi proses anggaran dan pelaporan berperan dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi waktu dalam tata kelola pemerintahan daerah.

**Gambar 1. Tren Capaian Kinerja dan Efisiensi Biaya Operasional (2020-2023)**



Sumber: Data LPPD dan LPKD Kota Balikpapan



Gambar 2. Perbandingan Waktu Proses Administrasi Sebelum dan Sesudah SIM  
Sumber: Interpretasi dari Dokumentasi prosedur operasional dan asumsi efisiensi berbasis studi terdahulu: Saputra. 2023

#### 4. Hambatan dalam Implementasi SIM

Meskipun implementasi SIM membawa dampak positif, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di bidang teknologi informasi, terutama di unit-unit kerja non-teknis. Hal ini menghambat optimalisasi pemanfaatan seluruh fitur yang tersedia dalam sistem. Selain itu, kurangnya interoperabilitas antar aplikasi juga menghambat integrasi data antar unit, menyebabkan redundansi data dan kerja ganda. Masalah-masalah tersebut menunjukkan pentingnya penguatan literasi digital serta penyusunan strategi integrasi sistem antar instansi. Saputra (2023) juga menegaskan bahwa faktor SDM dan kebijakan interoperabilitas menjadi kendala klasik dalam adopsi sistem informasi publik di Indonesia.

#### 5. Refleksi terhadap Literatur dan Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini memperkuat literatur sebelumnya yang menyatakan bahwa keberhasilan transformasi digital di sektor publik sangat dipengaruhi oleh dukungan kebijakan, kapasitas SDM, dan kesiapan infrastruktur. Nabilah & Moorcy (2021) menyebutkan bahwa sinergi antara regulasi dan kesiapan kelembagaan menentukan keberlanjutan penggunaan sistem digital. Temuan dari Kota Balikpapan menunjukkan bahwa SIM bukan hanya instrumen teknologi, tetapi juga katalisator perubahan budaya kerja birokrasi menuju efisiensi dan akuntabilitas.

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) memberikan dampak positif terhadap efisiensi operasional pada Pemerintah Daerah Kota Balikpapan. Hasil dokumentasi dari laporan LPPD, LKPD, dan LKjIP selama periode 2020-2023 mengindikasikan peningkatan capaian indikator kinerja utama dari 85% menjadi 92%, penghematan anggaran operasional sebesar  $\pm 7\%$ , serta percepatan signifikan dalam proses administrasi seperti pengadaan, pengajuan anggaran, dan pelaporan. Penerapan aplikasi seperti SIMDA dan e-Procurement telah terbukti mempercepat alur kerja dan memperkecil potensi kesalahan birokrasi.



Efisiensi ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan teknis, tetapi juga menjadi indikator keberhasilan transformasi digital sektor publik di tingkat pemerintah daerah. Dengan demikian, SIM berperan penting dalam menciptakan birokrasi yang responsif, efisien, dan akuntabel. Namun demikian, keterbatasan dalam hal kesiapan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi serta kendala integrasi sistem antar perangkat daerah masih menjadi hambatan yang perlu segera diatasi.

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal pendekatan data sekunder yang hanya bersumber pada dokumentasi resmi, tanpa triangulasi dengan wawancara atau observasi lapangan. Oleh karena itu, hasil kajian ini sebaiknya dipandang sebagai evaluasi awal berbasis dokumen yang dapat ditindaklanjuti dengan studi lapangan pada tahap selanjutnya.

## Saran

Berdasarkan hasil temuan dan evaluasi terhadap implementasi SIM, penulis memberikan beberapa rekomendasi untuk mendukung keberlanjutan dan peningkatan efisiensi operasional di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Balikpapan:

### 1. Penguatan Literasi Digital dan Kapasitas SDM

Pemerintah daerah perlu mengembangkan program pelatihan berkelanjutan dalam bidang pengelolaan dan pemanfaatan SIM bagi ASN, khususnya yang bertugas di bidang perencanaan, keuangan, dan layanan publik. Kegiatan ini dapat difasilitasi oleh BKPSDM dan Dinas Komunikasi dan Informatika secara terintegrasi.

### 2. Integrasi Sistem Informasi Antar Perangkat Daerah

Interoperabilitas antar sistem perlu segera diwujudkan untuk mencegah duplikasi proses dan meningkatkan efisiensi lintas-unit kerja. Penyusunan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang mengatur standar teknis integrasi sistem menjadi langkah strategis dalam mendorong konsolidasi data dan sinergi aplikasi.

### 3. Penguatan Kebijakan Berbasis Evaluasi Tahunan

Evaluasi implementasi SIM perlu dilakukan secara berkala dengan indikator kinerja yang terukur dan konsisten setiap tahun. Hasil evaluasi tersebut sebaiknya digunakan sebagai dasar dalam penyesuaian rencana strategis dan penganggaran daerah.

### 4. Penganggaran Teknologi Informasi dalam RPJMD

Alokasi anggaran untuk pemeliharaan, pengembangan, dan pengamanan sistem informasi sebaiknya dirancang secara jangka panjang melalui integrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), guna memastikan keberlanjutan teknologi yang digunakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Saputra, Y. B. (2023). *Jurnal Kompak*.  
Nabilah, B., & Moorcy, N. H. (2021). *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Daerah*.  
Rangkuti, Z. S., & Nasution, M. I. P. (2024). *Jurnal Ilmiah Nusantara*.  
McLeod, R., & Schell, G. (2008). *Management Information Systems, Pearson*.  
OECD. (2019). *Digital Government Review of Indonesia*.  
*Laporan LPPD, LKPD, LKjIP Kota Balikpapan (2023)*  
*Permendagri No. 70 Tahun 2019*  
KemenPAN-RB. (2022). *Pedoman SPBE*.